RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULUKUMBA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba ini dapat diselesaikan

Penyusunan RENSTRA SKPD ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Daerah No.15 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026 .

Dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja ini merupakan uraian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD BUPATI terpilih 2021-2026 untuk urusan ketenagakerjaan selama 5 tahun kedepan, sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja yang diuraikan secara detail.

Penyusunan RESTRA SKPD ini masih terdapat kekurangan yang perlu dperbaiki untuk kesempurnaannya baik isi maupun penyajiannya oleh karena itu masukan, saran, kritik sangat diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan RENSTRA ini .

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yng telah membantu dalam proses Penyusunan RENSTRA-Dinas Tenaga kerja kabupaten bulukumba

Bulukumba, Januari 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

III.2 Telaah Visi, Misi Dan Program KD dan wakil KD Terpilih

III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kot/Prov

III.3 Telahaan RTRW dan KLHS

III.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENELENGGARAAN URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);

15. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032;

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2016-2021

23. Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.

1.3.Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BulukumbaTahun 2022-2026 dimaksudkan sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Bulukumba dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba yaitu :

a. Sebagai pedoman dalam merumuskan Kebijakan program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan periode 2016-2021 melalui Kegiatan-kegiatan di sub Dinas/Seksi.

b. Sebagi pedoman dalam merumuskan Kegiatan-kegiatan bidang ketenagakerjaan untuk mencapai kinerja bagi Pencapaian dan sasaran DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tahun 2022 – 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat D.aerah, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Tugas Pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan BidangTenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 26/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyenggaraan Pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    a. Mengkoordinasikan Perumusan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja.
    b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja.
    c. Mengkoordinasikan pembinaan, pengelolaan, penempatan tenaga kerja,pengawasan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugasketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba;
    d. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Tenaga dengan instansi terkait guna memudahkan pelaksanaan dan kelancaran tugas;

e. Melaksanakan Pengendalian, Penempatan dan Pembinaan Kepegawaian Lingkup Dinas Tenaga Kerja;
f. Mengendalikan Pengelolaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja;
g. Menyelenggarakan urusan umum Dinas Tenaga Kerja;
h. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Tenaga Kerja;
i. Mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan Program dan Kegiatan antar tingkatan Pemerintahan dalam Lingkup Kerja dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja;
j. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
k. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan lingkup Kesekretariatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;

b. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja;
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
e. Melaksanakan pelayananan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja

1. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan Pembinaan Pelatihan dan Komptensi Tenaga Kerja dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerjamempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
b. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
e. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaaan Bidang Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai Pelaksanaan Tugas bawahan;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.

1. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
b. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

e. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaaan Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja.

1. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan tenaga kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
   a. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan tenaga kerja;
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
   c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kerja;
   d. Mengkoordinasikan pembinaan tenaga kerja;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pengawasan, monitoring, pengendalian dan penyuluhan pembinaan tenaga kerja;
   f. Mengkoordinasikan pelaksanaan análisis pembinaan tenaga kerja;

g. Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial ;

1. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan Penyusunan Program, KegiatanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program
b. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kepada bawahan
d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
e. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang nomor 32 tahun tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Struktur organisasi Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Bulukumba Nomor 10 tahun 2008, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bulukumba.

Berdasarkan Perda tersebut di atas maka susunan Struktur Organisasi DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Bulukumba adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, yang membawahi 2 (Dua) sub.bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program,Pelaporan dan Keuangan

C. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Program Pelatihan dan Tenaga Kerja Magang
2. Seksi Pembinaan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja
3. Seksi Pembinaan Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja.

D. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja membawahi 3 (Tiga) Seksi yaitu:

1. Seksi Pembinaan dan Penenpatan Tenaga Kerja
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat

E. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,membawahi 3(tiga) seksi yaitu :

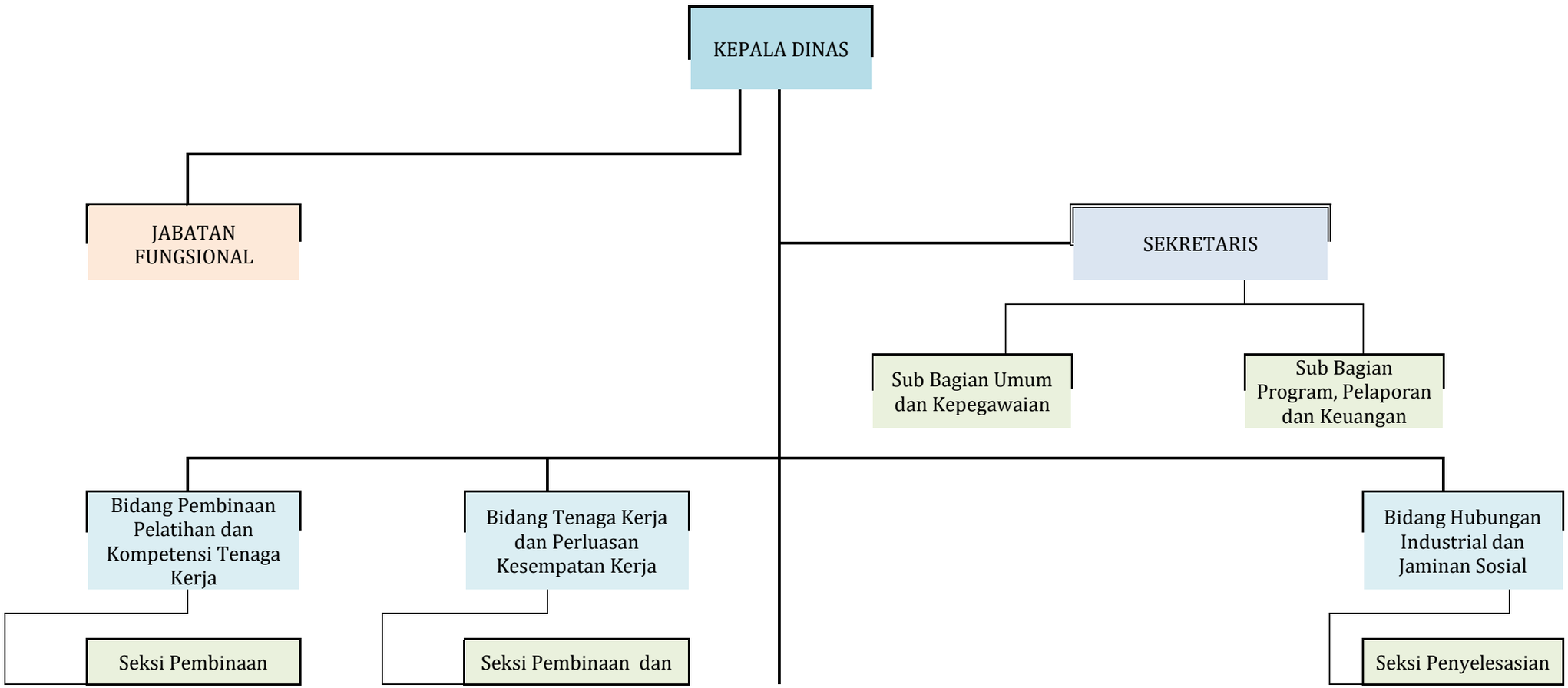
1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri
2. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja,Pengusaha dan Syarat-Syarat Kerja.
3. Seksi Pembinaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

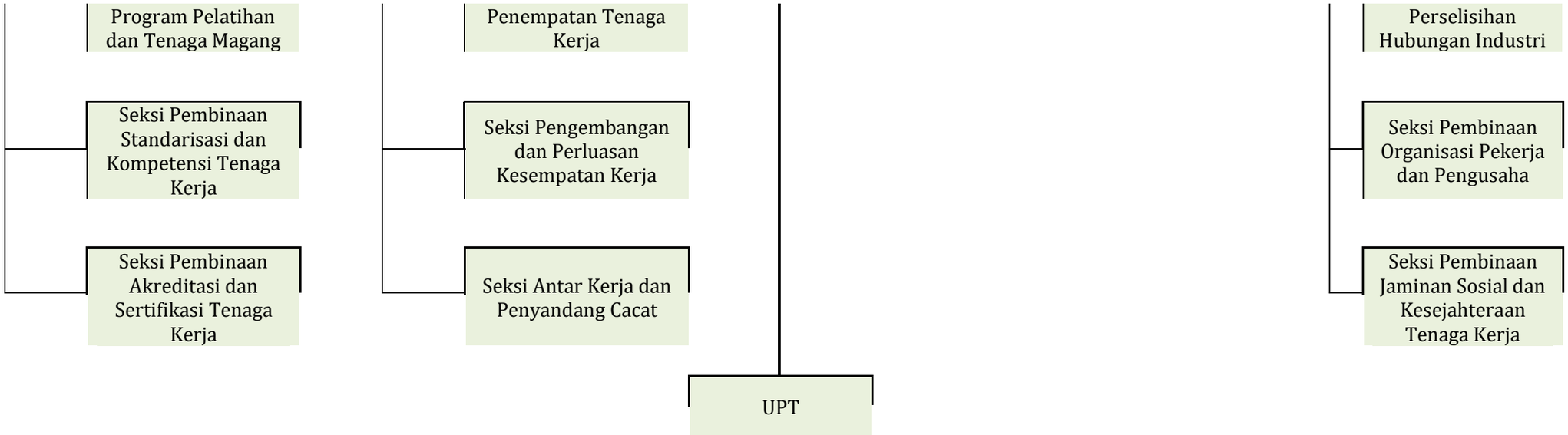
F. Kepala UPTD dibawahi 1 (Satu) yaitu ;

1. Sub.Bagian Tata Usaha

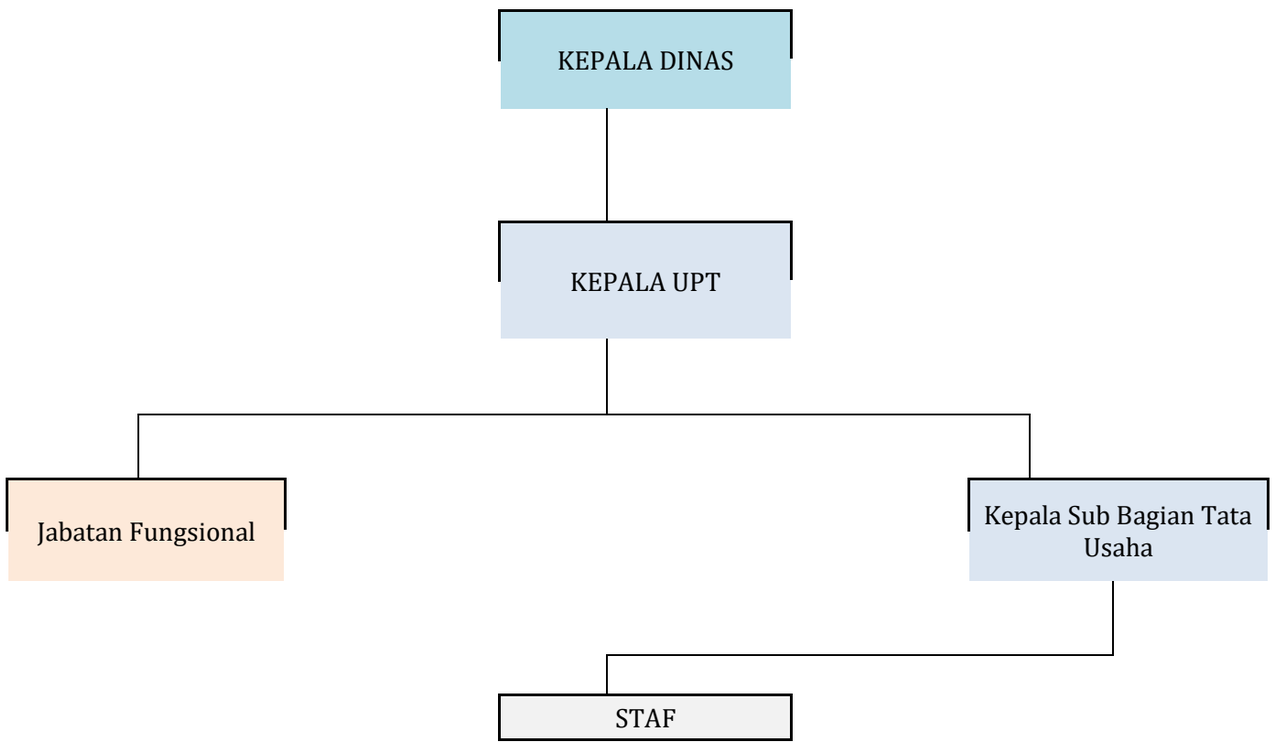
G. Jabatan Fungsional diantaranya yaitu Instruktur

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBAMPIR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




Program Pelatihan dan Tenaga Magang
Seksi Pembinaan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja
Seksi Pembinaan Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat
UPT
Perselisihan Hubungan Industri
Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha
Seksi Pembinaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA



Dinas Tenaga Kerja kab. Bulukumba, 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba sebagai Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang KesejahteraanTenaga Kerjadi Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.Jumlah pegawai yang ada pada DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba saat ini sebanyak 32 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1. JUMLAH PEGAWAI MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	KEPALA DINAS						1	1
2	SEKRETARIAT					1		1
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			1				1
4	PENGADIMINSTRASI UMUM			1				1
5	PENGADIMINSTRASI KEPEGAWAIAN							0
6	PENGELOLA PEMANFAATAN DAERAH				1			1

7	KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN				1			1
8	ANALISIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN						1	1
9	BENDAHARA	1						1
10	PENGELOLA GAJI					1		1
11	KEPALA BIDAN, PELATIHAN DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA						1	1
12	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA						1	1
13	KEPALA SEKSI PEMBINAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA						1	1
14	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMAGANGAN					1		1
15	KEPALA BIDAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA					1		1
16	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA					1		1
17	PENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA							0
18	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA					1		1
19	ANALISIS TENAGA KERJA	1						1
20	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN						1	1

21	KEPALA SEKSI ANTAR KERJA DAN PENYANDANG CACAT						1	1
22	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						1	1
23	PENGAWAS INDUSTRI					1		1
24	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEKERJA PENGUSAHA DAN SYARAT-SYARAT KERJA						1	1
25	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA						1	1
26	ANALIS PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA					1		1
27	ANALIS KESELAMATAN KERJA							0
28	INSTRUKTUR MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				1			1
29	KEPALA UPT							0
30	KASUBAG TATA USAHA				1			1
31	PENGADIMINSTRASI UMUM			1				1
32	INSTRUKTUR AHLI MUDA			1	2			3
33	INSTRUKTUR AHLI MADYA						1	1
34	INSTRUKTUR PENYEDIA						1	1
	TOTAL	**2**	**0**	**4**	**6**	**8**	**11**	32

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	KEPALA DINAS				1	1
2	SEKRETARIAT				1	1
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			1		1
4	PENGADIMINSTRASI UMUM		1			1
5	PENGADIMINSTRASI KEPEGAWAIAN					0
6	PENGELOLA PEMANFAATAN DAERAH		1			1
7	KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN			1		1
8	ANALISIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN			1		1
9	BENDAHARA			1		1
10	PENGELOLA GAJI			1		1
11	KEPALA BIDAN, PELATIHAN DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA				1	1
12	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA				1	1
13	KEPALA SEKSI PEMBINAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA				1	1
14	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMAGANGAN			1		1
15	KEPALA BIDAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			1		1

Dinas Tenaga Kerja kab. Bulukumba, 2021

16	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA			1		1
17	PENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA					0
18	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA			1		1
19	ANALISIS TENAGA KERJA			1		1
20	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN			1		1
21	KEPALA SEKSI ANTAR KERJA DAN PENYANDANG CACAT			1		1
22	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			1		1
23	PENGAWAS INDUSTRI			1		1
24	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEKERJA PENGUSAHA DAN SYARAT-SYARAT KERJA			1		1
25	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA			1		1
26	ANALIS PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA			1		1
27	ANALIS KESELAMATAN KERJA					0
28	INSTRUKTUR MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			1		1
29	KEPALA UPT					0
30	KASUBAG TATA USAHA			1		1
31	PENGADIMINSTRASI UMUM		1			1
32	INSTRUKTUR AHLI MUDA			3		3
33	INSTRUKTUR AHLI MADYA				1	1

34	INSTRUKTUR PENYEDIA			1		1
	TOTAL	**0**	**3**	**23**	**6**	**32**

JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	KEPALA DINAS			1		1
2	SEKRETARIAT				1	1
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			1		1
4	PENGADIMINSTRASI UMUM	1				1
5	PENGADIMINSTRASI KEPEGAWAIAN					0
6	PENGELOLA PEMANFAATAN DAERAH	1				1
7	KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN			1		1
8	ANALISIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN			1		1
9	BENDAHARA			1		1
10	PENGELOLA GAJI			1		1
11	KEPALA BIDAN, PELATIHAN DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA				1	1
12	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA				1	1

13	KEPALA SEKSI PEMBINAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA				1	1
14	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMAGANGAN			1		1
15	KEPALA BIDAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			1		1
16	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA			1		1
17	PENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA					0
18	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA			1		1
19	ANALISIS TENAGA KERJA			1		1
20	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN			1		1
21	KEPALA SEKSI ANTAR KERJA DAN PENYANDANG CACAT			1		1
22	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			1		1
23	PENGAWAS INDUSTRI				1	1
24	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEKERJA PENGUSAHA DAN SYARAT-SYARAT KERJA			1		1
25	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA			1		1
26	ANALIS PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA			1		1
27	ANALIS KESELAMATAN KERJA					0

28	INSTRUKTUR MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			1		1
29	KEPALA UPT					0
30	KASUBAG TATA USAHA			1		1
31	PENGADIMINSTRASI UMUM	1				1
32	INSTRUKTUR AHLI MUDA			3		3
33	INSTRUKTUR AHLI MADYA			1		1
34	INSTRUKTUR PENYEDIA		1			1
	TOTAL	**3**	**1**	**23**	**5**	**32**

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PETA JABATAN

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
3	ESELON IV	11
4	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	16
	TOTAL	**32**

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	KEPALA DINAS	1		1
2	SEKRETARIAT	1		1

Dinas Tenaga Kerja kab. Bulukumba, 2021

3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	1
4	PENGADIMINSTRASI UMUM	1		1
5	PENGADIMINSTRASI KEPEGAWAIAN			0
6	PENGELOLA PEMANFAATAN DAERAH	1		1
7	KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN		1	1
8	ANALISIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN		1	1
9	BENDAHARA	1		1
10	PENGELOLA GAJI		1	1
11	KEPALA BIDAN, PELATIHAN DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA	1		1
12	KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA	1		1
13	KEPALA SEKSI PEMBINAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA	1		1
14	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	1		1
15	KEPALA BIDAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		1	1
16	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		1	1
17	PENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA			0
18	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA		1	1
19	ANALISIS TENAGA KERJA		1	1
20	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN		1	1
21	KEPALA SEKSI ANTAR KERJA DAN PENYANDANG CACAT	1		1

22	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		1	1
23	PENGAWAS INDUSTRI	1		1
24	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI PEKERJA PENGUSAHA DAN SYARAT-SYARAT KERJA	1		1
25	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA		1	1
26	ANALIS PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA		1	1
27	ANALIS KESELAMATAN KERJA			0
28	INSTRUKTUR MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1		1
29	KEPALA UPT			0
30	KASUBAG TATA USAHA		1	1
31	PENGADIMINSTRASI UMUM	1		1
32	INSTRUKTUR AHLI MUDA	2	1	3
33	INSTRUKTUR AHLI MADYA	1		1
34	INSTRUKTUR PENYEDIA	1		1
	TOTAL	**18**	**14**	**32**

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH	1	0		1
2	BANGUNAN	8	14		22
3	KENDARAAN	4			4
4	P.C Unit	3		4	7
5	LAPTOP	4			4
6	PRINTER	6			6
7	ALAT BENGKEL	10		1	11
8	ALAT LABORATORIUM	7			7
9	FILLING CABINET	2			2
10	BRANDKAS	2			2
11	MESIN ABSEN	1			1
12	LCD	1			1
13	MEJA BIASA	4			4
14	MEJA I/2 BIRO	3			3
15	KURSI FIBER		89	61	150
16	KURSI TAMU		2	1	3
17	KURSI PUTAR	4	3		7
18	KURSI BIASA	5	2		7
19	MEJA KOMPUTER		1		1
20	SOFA	1			1
21	JAM	1			1
22	AC SPLIT	5	5		10
23	KIPAS ANGIN	1			1
24	TELEVISI	1		1	2
25	AMPLIFIER		1	2	3
26	MESIN JAHIT	9			9

Dinas Tenaga Kerja kab. Bulukumba, 2021

27	LAMBANG GARUDA	1			1
28	MEJA KERJA	4	1		5
29	KURSI KERJA	6			6
30	KURSI TAMU	2			2
31	LEMARI ARSIP	4	3		7
	TOTAL	**100**	**121**	**70**	**291**

Dengan melihat jumlah PNS tersebut di atas secara kuantitas sudah cukup memadai, namun dari segi kualitas yakni dengan menggunakan tolok ukur Pendidikan formal dan dengan mempertimbangkan tuntutan Kompetensi Pegawai dalam menangani bidang tugasnya, maka masih perlu dilakukan peningkatan kualitas. Dari 32 orang PNS yang mempunyai tingkat pendidikan S2 hanya 5 orang (3,44%), S1 sebanyak 23 orang (75,86 %), Diploma sebanyak 1 orang(3,44 %), SMA sebanyak 3 orang (3,44%).

1. Sarana dan Prasarana.

Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam menunjang Kinerja Penyelenggaraan tugas dan fungsi sampai pada tahun 2017 antara lain :

- Gedung Kantor 2 Unit yaitu :
    1. Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba yang berlokasi di Jl.Lanto Dg.Pasewang No.15 Bulukumba yang merupakan gedung Kantor utama yang berfungsi sebagai Kegiatan operasional kantor sehari-hari.

2. Kantor UPT-Balai Latihan Kerja Bulukumba yang berlokasi di Jl.Lanto Dg.Pasewang Bulukumba yang merupakan sebagai tempat Pelatihan Berbasis Masyarakat.

- Kendaraan Dinas/ Operasional terdiri dari :
  1. Kendaraan Roda Empat sebanyak 4 unit
  2. Komputer sebanyak 4 unit
  3. Laptop sebanyak 3 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realiasai Capaian					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per tahun			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Besaran Kasus yang diselasaikan dengan perjanjian bersama (PB)			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Besaran pencari kerja yang			820	900	1.500	2.000	2200	668	736	1,464	1,887	1.900	100%	100%	100%	100%	100%

	terdaftar yang ditempatkan																	
4	Keselamatan dan perlindungan			100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek			80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah			1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Besaran pemeriksaan perusahaan			2 K asus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Besar pengujian peralatan diperusahaan			1 Perala tan	1 Perala tan	1 Perala tan	1 Perala tan	1 Perala tan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			272	350	800	337	310	128	240	480	416	-	144	110	320	179	210
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat			150	150	524	150	160	96	112	336	80	88	154	138	198	170	172

11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			0,78	0,84	1	0,75	0,80	0,78	0,84	1	0,75	0,80	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3			500	500	700	720	730	500	500	700	720	730	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan akhir tahun 2020 atau lima tahun terakhir secara umum boleh dikatakan berhasil, hal ini apabila diukur dari indikator agregat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dan Laporan Keuangan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas bidang Kesejahteraan Ketenagakerjaan secara umum kinerjanya juga dapat dikatakan berhasil dengan memperhatikan indikator kinerja LAKIP. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja DinasTenaga Kerja Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada pelaksanaan Tupoksinya pada masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Ketenagakerjaan

   Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

   Salah satu sasaran utama pembangunan ini adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga menyerap tambahan angkatan kerja.

   Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja atau siap masuk pasar kerja, konsep bekerja menunjukkan mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh pendapatan dan lamanya bekerja sedikit 1 jam secara kontinu dalam semingguyang lalu.

   Pengertian bekerja ini termasuk pekerja tanpa upah yang membantu dalam usaha/ Kegiatan ekonomi keluarga. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten

Bulukumba pada Tahun 2020 sebanyak 190.242 orang, mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja. Jumlah angkatan Kerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Data Angkatan Kerja Kabupaten Bulukumba

Tahun 2020

Angkatan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	107.731	77.108	184.839
Pengangguran	3.032	2.371	5.403
Jumlah	110.763	79.479	190.242

Kesempatan kerja merupakan daya tampung dari angkatan kerja dimana penduduk yang bekerja sebanyak 184.839 orang. Bila dilihat dari penyerapan Tenaga kerja maka sektor pertanian mendominasi tingkat tertinggi sebanyak 100.52 orang menyusul industry perdagangan 10.920 ornag, sektor perdagangan 33.733 orang, sektor jasa Kemasyarakatan 29.337 orang sisanya berada pada sektor-sektor lain.

Dengan tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian maka perlu penanganan Pemerintah untuk menaikkan produktivitas agrobisnis disektor pertanian.

Dalam penanganan pembangunan bidang ketenagakerjaan ada 3 macam tugas pokok, antara lain :

a. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Sisa pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir tahun 2016 sebanyak 5.402 orang terdiri laki-laki sebanyak 3.032 orang dan perempuan sebanyak 2.371 orang, sedang pencari kerja yang terdaftar baru sebelum akhir Tahun 2016sebanyak 3.629 orang ditempatkan sebanyak 263 orang , sisa pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir Tahun 2016sebanyak 3.216 orang.

b. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 7 paket dengan jumlah peserta 112 orang dari para angkatan kerja yang dilatih pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Bulukumba.

c. Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja.

1. Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP)

   Tahun 2020 UMP : Rp. 3.103.800,-

   Tahun 2021 UMP : Rp. 3.165.876

2. Jumlah perusahaan di Kabupaten Bulukumba menurut besar kecilnya berdasarkan UU No.7 tahun 1981 sebanyak 167 buah dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 3.172 orang.

- Perusahaan besar yaitu Perusahaan dengan pekerja 100 orang ke atas sebanyak 7 buah dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 2.7645 orang.
- Perusahaan sedang dengan pekerja 50 orang ke atas sebanyak 9 buah perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 181 orang.
- Perusahaan kecil dengan pekerja kurang 25 orang sebanyak 151 buah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 408 orang.
- Jumlah perusahaan pekerja tahun 2020 adalah 1587.113

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

Dalam lima tahun ke depan penanganan Pembangunan Kesejahteraan Ketenagakerjaan tidak luput dari kendala, hambatan yang merupakan tantangan dalam pencapaian target sasaran Pembangunan. Adapun tantangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kecenderungan pendangkalan nilai budaya akibat era informasi yang mengglobal mengancam tatanan masyarakat yang telah terbangun oleh nilai-nilai luhur yang mengakibatkan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat mulai terkikis (individualistis).
b. Merebaknya penggunaan narkoba dan peredaran fornografi ditengah masyarakat yang akan berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat yang terbangun dari nilai-nilai agama dan budaya.
c. Pasar dan mobilitas tenaga kerja yang makin bebas memberikan indikasi tingginya tingkat persaingan tenaga kerja.

2. Peluang

Selain tantangan yang dihadapi dalam penanganan Pembangunan sesuai Tupoksi yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, juga mempunyai peluang yang harus dimanfaatkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Adapun peluang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Adanya produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor

26/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba,dari segi legalitas telah ditetapkannya Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bulukumba sebagai lembaga teknis daerah yang menangani Pembangunan Ketenagakerjaan, sehingga memberikan peluang kerja sama antar lembaga/instansi di daerah lembaga/instansi pada Propivinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian yang ada di Pemerintah Pusat yang terkait dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

b. Adanya kepedulian Pemerintah Pusat dengan memberikan alokasi dana yang disebut dana Tugas pembantuan, Dekonsentrasi melalui kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Anggaran langsung dari Pusat yang dikelolah oleh Kementerian yang terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu- isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi , Isu-isu strategis baik internal maupun eksternal merupakan factor-foktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai pembangunan ketenagakerjaan di kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil capaian sasaran pembangunan sektor ketenagkerjaan di kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 dalam upaya menurunkan angka pengangguran, mengoptimalisasi perlindungan ketenagakerjaan masih terdapat adanya permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kab. Bulukumba adalah :

1. Lapangan pekerjaaan semakin terbatas
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Rendahnya tingkat pendidikan
4. Terbatasnya Alokasi anggaran program dan kegiatan
5. Rendahnya kompetensi pencari kerja
6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagkerjaan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba di antaranya adalah :

- Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja
- Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat.

- Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja.
- Tidak adantan tenaga fungsional mediator.
- Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja.
- Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh.

Faktor-faktor eksternal dan Internal lainnya yang turut memberikan konstribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah:

- Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.
- Tidak adanya arus masul modal asing yang sifatnyapadat karya.
- Tekanan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, yang terdiri dari fakto-faktor “Penghambat dan Faktor” Pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dan merupakan input bagi perumusan isu-isu strategi jamji Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulukumba adalah program perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, diantaranya yaitu Terwujudnya Hub.Industrial.

1. Membuka Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat.
3. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahaan baru dan wirausahaan berbasis agribisnis, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif.
4. Penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan SDM.
5. Mendorong serta mengoptimalkan BLK (Balai Latihan Kerja).
6. Mendorong pembinaan perusahaan dan pekerja sehingga terwujudnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan si pemberi kerja (perusahaan).
7. Penyempatan tenaga kerja di sektor formal yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
8. Mendorong meningkatnya pengetahuan tentang satuan ketenagakerjaan dan syarat kerja bagi perusahaan.
9. Menggelar bursa kerja (Job Fair) Kab.Bulukumba.
10. Untungkan pengusaha dan sejahterakan pekerja/buruh.

Adapun visi dan misi Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba adalah sebagai berikut:

VISI : Mewujudkan masyarakat **Produktif**, **Yang Berkarakter Kearifan Local** menuju bulukumba **Maju Dan Sejahtera**

MISI :

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik

3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitasdan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik wisatawan domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat
9. Pembangunan dan meningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
12. Penegakan supremasi hokum dan pertahanan dan keamanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra / Kab/ Kom

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) kementrian tenaga kerja dan transmigrasi RI terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba di tujukan untuk sinkronisasi arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan dalam upaya pencapaian pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan.

I. Penempatan dan pelatihan

Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.	Fasilitas program dan pendampingan pemberdayaan masyarakat,pengembangan ekonomi local, pengembangan kewirausahaan.	peningkatan kompetensi dan kualitas melalui penciptaan kewirausahaan.
2.	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja.	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Peningkatan kerjasama luar negeri.	Perluasan penciptaan kesumpahan kerja di dalam dan luar negeri.
Dinas Tenaga Kerja				

1.	Menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi .	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.	Perluasan tenaga kerja.	Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas melalui penciptaan kewirausahaan.
2.	Mengurangi pengangguran.	- Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. - Meningkatnya pelayanan tenaga kerja luar negeri.	- Meningkatnya kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. - Peningkatan layanan terpadu satu pintu (ITPS)	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Program perluasan pengembangan dan kesempatan kerja.

II. Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan	Program pengembangan hubungan

	meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.	meningkatnya peran kelembagaan industrial.	hubungan industrial.	industrial dan peningkatan jamsostek.
Dinas Tenaga Kerja Kab.Bulukumba				
1.	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan keadilan dan meningkatkan peran kelembagaan serta penyelesaian hubungan industrial.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial.	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
2.	Kepesertaan jamsostek bagi pekerja/buruh	- Penerapan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. - Peningkatan kepesertaan jamsostek.	Peningkatan pemahaman Aturan ketenagakerjaan	Pembinaan dan penyelesaian perselisihan hub.industrial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkaitannya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lingkungan dan budaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksistensi awal SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam tahun mendatang, Dikaitkan dengan indikasi programpemanfaatan ruang jangka menengah dan RTRW, SKPD menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut, untuk itu penelaahan RTRW, aspek yang perlu di telaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang
2. Struktur tata ruang saat ini
3. Rencana pola ruang
4. Pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang menengah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN (TAHUN)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan mutu dan keterampilan tenaga kerja baik ang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta - Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masarakat - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	800 524 0,75 %	805 550 1%	836 582 1,25%	860 600 1,80 %	900 610 2%
2	Meningkatnya penyediaan informasi pasar kerja dan kompetensi calon pekerja migran di indonesia.	- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online. - Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).	- Rasio lulusan S1/S2/S3 - Besaran pencari kerja ang terdaftar ditempatkan	662.001 1%	662,020 2,68 %	662,075 3%	663,231 3,45 %	663,250 3,60 %
3	Meningkatkan peranan kelembagaan serta penyelesaian hubungan industrial bagi perusahaan serikat pekerja/buruh dan jaminan sosial tenaga kerja.	- Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan - pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja - penyelenggaraan verifikasi dan kekapitulasi ke anggotaan pada organisasi pengusahaan serikat pekerja buruh serta nonaffiliasi.	- Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun - Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB) - Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek - Besaran pemeriksaan perusahaan - Besaran pengujian peralatan di perusahaan	19.9 % 0.62 % 0.94 % 0,6% 0,26 %	20.1 % 2,48 % 2,12 % 0,21 % 0,35 %	21.15 % 3,1% 3,1% 1,35% 2,31%	21.15 % 3,29 % 3,20 % 1,48 % 2,31 %	22% 3,40 % 3,20 % 2,14 % 3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besarterhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja tahun 2021-2026, maka ditetapkan strategi sesuai masing-masing misi antara lain sebagaimana tersaji secara dalam tabel.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode Renstra tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji secara rinci dalam tabel. Sebagaimana berikut ini

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Fasilitas program dan pendampingan pemberdayaan masyarakat,pengembangan ekonomi local, pengembangan kewirausahaan	peningkatan kompetensi dan kualitas melalui penciptaan kewirausahaan.
Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja.	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Peningkatan kerjasama luar negeri	Perluasan penciptaan kesumpahan kerja di dalam dan luar negeri.
Menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi .	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.	Perluasan tenaga kerja.	Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas melalui penciptaan kewirausahaan
Mengurangi pengangguran.	- Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Meningkatnya kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja luar negeri.	Peningkatan layanan terpadu satu pintu (ITPS)	Program perluasan pengembangan dan kesempatan kerja.
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial.	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial.	Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jamsostek
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan keadilan dan meningkatkan peran kelembagaan serta penyelesaian hubungan industrial.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial.	Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
Kepesertaan jamsostek bagi pekerja/buruh	- Penerapan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.	Peningkatan pemahaman Aturan ketenagakerjaan	Pembinaan dan penyelesaian perselisihan hub.industrial
	Peningkatan kepesertaan jamsostek.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bulukumba
(Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DINAS TENAGA KERJA											
3	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**62.446.070,00**		**65.429.630,00**		**72.143.563,00**		**79.429.830,00**		**88.229.630,00**
3	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

3	01	01	2.01	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA Pokok dan Perubahan DPA Pokok dan Perubahan Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	38.429.630	12 Bulan	40.429.630	12 Bulan	45.042.963	12 Bulan	50.429.630	12 Bulan	56.429.630
3	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perjanjian Kinerja	12 Bulan	4.999.700	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.900.000
3	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Program dan Kegiatan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	12 Bulan	19.016.740	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	21.100.600	12 Bulan	22.000.200	12 Bulan	23.900.000
3	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.508.819.570**		**3.510.820.000**		**3.522.519.150**		**3.533.820.000**		**3.554.820.000**
3	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.396.443.550	12 Bulan	3.396.443.550	12 Bulan	3.396.443.550	12 Bulan	3.396.443.550	12 Bulan	3.396.443.550
3	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	107.376.450	12 Bulan	109.376.450	12 Bulan	120.075.600	12 Bulan	130.376.450	12 Bulan	150.376.450
3	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir tahun	3 Bulan	4.999.570	3 Bulan	5.000.000	3 Bulan	6.000.000	3 Bulan	7.000.000	3 Bulan	8.000.000
3	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pemenuhan adminitrasi umum**		**22.125.000**		**22.125.000**		**22.125.000**		**22.125.000**		**22.125.000**
3	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	1 orang	22.125.000	1 orang	22.125.000	1 orang	22.125.000	1 orang	22.125.000	1 orang	22.125.000

3	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**182.058.670**		**197.058.670**		**233.058.670**		**243.058.670**		**369.318.615**
3	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor	12 Bulan	1.242.500	12 Bulan	2.242.500	12 Bulan	3.242.500	12 Bulan	4.242.500	12 Bulan	3.000.000
3	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makan Minum Kantor	12 Bulan	17.920.000	12 Bulan	19.920.000	12 Bulan	20.920.000	12 Bulan	25.920.000	12 Bulan	30.920.000
3	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	1.509.900	12 Bulan	2.509.900	12 Bulan	3.509.900	12 Bulan	4.509.900	12 Bulan	5.012.345
3	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Minuman Tamu	12 Bulan	4.975.000	12 Bulan	5.975.000	12 Bulan	6.975.000	12 Bulan	7.975.000	12 Bulan	8.975.000
3	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	12 Bulan	156.411.270	12 Bulan	166.411.270	12 Bulan	198.411.270	12 Bulan	200.411.270	12 Bulan	321.411.270
3	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**19.999.880**		**20.999.880**		**20.999.880**		**20.999.880**		**30.999.880**
3	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit	19.999.880	1 unit	20.999.880	1 unit	20.999.880	1 unit	20.999.880	1 unit	30.999.880
3	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**66.335.456**		**78.335.456**		**86.335.456**		**95.335.456**		**110.335.456**
3	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	41.039.456	12 Bulan	50.039.456	12 Bulan	56.039.456	12 Bulan	60.039.456	12 Bulan	70.039.456
3	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor	12 Bulan	25.296.000	12 Bulan	28.296.000	12 Bulan	30.296.000	12 Bulan	35.296.000	12 Bulan	40.296.000

3	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**17.624.500**		**17.870.000**		**19.824.500**		**20.924.500**		**23.864.500**
3	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	16.894.500	4 Unit	17.000.000	4 Unit	18.894.500	4 Unit	19.894.500	4 Unit	20.894.500
3	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerehabilitasinya gedung kantor	1 Paket	730.000	1 Paket	870.000	1 Paket	930.000	1 Paket	1.030.000	1 Paket	2.970.000
2	**07**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahan										
2	07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi		**473.389.100**		**582.387.800**		**603.389.100**		**711.389.100**		**824.309.100**
2	07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tersedianya Pelayanan peserta Pelatihan	1 Paket	205.001.300	1 Paket	300.000.000	1 Paket	309.001.300	1 Paket	405.001.300	1 Paket	505.001.300
2	07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terciptanya Kondisi kerja yang kondusit										

						melalui sosialisasi/pelatihan										
2	07	3	2.02	01	pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tersedianya Sumber daya berbasis kompetensi	1 kegiatan	12.500.000	1 kegiatan	15.500.000	1 kegiatan	16.500.000	1 kegiatan	17.500.000	1 kegiatan	19.500.000
2	07	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	tersedianya tenaga kerja terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan menejemen pengelola usaha bagi wirausaha baru										
2	07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	tersedianya tenaga kerja yang terampil yang mengelola usahanya melalui pelatihan kewirausahaan	3 kelompok	255.887.800	3 kelompok	266.887.800	3 kelompok	277.887.800	3 kelompok	288.887.800	3 kelompok	299.807.800
2	07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya tenaga kerja terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan menejemen pengelola usaha bagi wirausaha baru										
2	07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja dalam menemuhui pasar kerja	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	

2	**0 7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja										
2	0 7	4	2.0 1		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota		**85.943.000**		**90.824.000**		**91.543.000**		**94.943.000**		**106.943.000**
2	0 7	4	1.0 1	04	Penyelanggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	1 kegiatan	13.975.000	1 kegiatan	14.856.000	1 kegiatan	15.575.000	1 kegiatan	15.975.000	1 kegiatan	16.975.000
2	0 7	4	2.0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja										
2	0 7	4	2.0 3	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	1 kegiatan	36.900.000	1 kegiatan	38.900.000	1 kegiatan	37.900.000	1 kegiatan	38.900.000	1 kegiatan	39.900.000
2	0 7	4	2.0 4		Pelindungan PMI (Pra , pmi dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)										
2	0 7	4	2.0 4	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah pelayanan CPMI/PMI dan terlaksannya pelatihan /bimtek/sosialisasi	1 kegiatan	35.068.000	1 kegiatan	37.068.000	1 kegiatan	38.068.000	1 kegiatan	40.068.000	1 kegiatan	50.068.000
2	0 7	5			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	mendorong terlaksanannya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagkerjaan demi meningkatnya										

						hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja									
2	07	5	2.01		pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beropersai dalam satu daerah kab/kota	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan		**74.992.500**		**89.992.500**		**110.992.500**		**182.992.500**		**198.992.500**
2	07	5	2.01	01	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	terwujudnya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan dan terwujudnya sosialisasi pengupahan	1 kegiatan	30.951.800	1 kegiatan	40.951.800	1 kegiatan	50.951.800	1 kegiatan	60.951.800	1 kegiatan	62.951.800
2	07	5	2.02		Pencegahan perselisihan Hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan										
2	07	5	2.02	01	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota	Terlaksanannya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksananya sosialisasi bipartit dan tripartit serta	1 kegiatan	24.893.000	1 kegiatan	28.893.000	1 kegiatan	29.893.000	1 kegiatan	90.893.000	1 kegiatan	100.893.000

					terselesainya hubungan indutrial									
2	0 7	5	2.0 2	03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi ke anggotaan pada organisasi pengusahaan serikat pekerja buruh serta nonafiliasi	terwujudnya sosialisasi pembentukan serikat pekerja di perusahaan dan terbentunya tim verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusahaan fedens dan konfedensi serikat pekrja	1 kegiatan	19.147.700	1 kegiatan	20.147.700	1 kegiatan	30.147.700	1 kegiatan	31.147.700	1 kegiatan	35.147.700

6.2 Rencana program dan kegiatan ,indikator kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2021-2026

SUB KEGIATAN PMDN 90	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SUB KEGIATAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	KEGIATAN PMDN 90	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR HASIL KEGIATAN	SATUAN	KEGIATAN									
			2017		2018		2019		2020		2021							2017		2018		2019		2020		2021	
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	Target					TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
														Kegiatan Administrasi Umum												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	12	52.000.000	12	58.000.000	12	58.000.000	264.000.000		Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan, Terlaksananya Jasa Petugas Kebersihan , Tersedianya Komponen Penerangan Bangunan Kantor, Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	12	52.000.000	12	58.000.000	12	58.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	7.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	15.500.000	12	15.500.000	56.000.000				Bulan	12	7.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	15.500.000	12	15.500.000
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen	10	60.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	10	100.000.000	405.000.000				Dokumen	10	60.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	10	100.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Petugas Kebersihan	Bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	116.000.000				Bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Penerangan Bangunan Kantor	bulan	10	1.800.000	10	1.900.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.250.000	9.950.000				bulan	10	1.800.000	10	1.900.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.250.000

Kantor																															
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000						bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali	50	150.000.000	50	160.000.000	50	190.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000	875.000.000					Kali	50	150.000.000	50	160.000.000	50	190.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	24.000.000	110.000.000					Bulan	Bln	20.000.000	Bln	21.000.000	Bln	22.000.000	Bln	23.000.000	Bln	24.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000						Bulan	Bln	12.000.000	Bln	12.500.000	Bln	13.000.000	Bln	15.000.000	Bln	15.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.500.000						Bulan	Bln	8.000.000	Bln	9.000.000	Bln	10.000.000	Bln	11.000.000	Bln	12.500.000
														Kegiatan Administrasi Umum														
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000	2	20.000.000	2	21.000.000	95.000.000	**Kegiatan Administrasi Umum**	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	unit	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000	2	20.000.000	2	21.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor											-		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pemanfaatan Peralatan Gedung Kantor yang Baru															
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor											-		Tersedianya Kursi dan Lemari Arsip	Pemanfaatan Mebeleur yang Baru															
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2													Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor															
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda Empat 1 buah dan Roda dua 3 buah	Unit	4	8.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	313.000.000	Kegiatan Administrasi Umum	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda Empat 1 Buah dan Roda Dua 2 Buah	Pemanfaatan Sarana Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	4	8.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000					
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	10	7.000.000	10	8.000.000	10	9.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	44.000.000	Kegiatan Administrasi Umum	Tersedianya biaya pemeliharaan Gedung Kantor	Pemanfaatan Sarana Gedung kantor	Unit	10	7.000.000	10	8.000.000	10	9.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000				
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya Gedung kantor	paket	1	50.000.000	1	55.000.000	1	300.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	525.000.000	Kegiatan Administrasi Umum	Tersedianya biaya pemeliharaan Gedung Kantor	Pemanfaatan Sarana pagar kantor	paket	1	50.000.000	1	55.000.000	1	300.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000				
														Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya																	

													Aparatur												
Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksanaanya pendidikan dan pelatihan aparatur	kegiatan	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	112.500.000		Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksanaanya pendidikan dan pelatihan aparatur	kegiatan	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000
													Kegiatan Administrasi Keuangan												
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Dokumen	2	4.000.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	5.000.000	2	5.000.000	23.000.000		Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,	terlaksaanaanya dokumen penyusunan laporan akhir tahun	Dokumen	3	9.000.000	3	9.500.000	3	9.500.000	3	10.000.000	3	10.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksanaanya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	25.000.000													
													Perencanaaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen RKA-DPA Pokok dan RKA-DPA Perubahan	Dokumen	3	19.000.000	3	20.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000	111.000.000		Terlaksanaanya Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terwujudnya perencanaan dokumen	Dokumen	5	34.000.000	5	36.000.000	5	40.000.000	5	42.000.000	5	45.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.000.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	20.000.000	86.000.000																			
													-	**kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**																		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tersediany a Pelayanan peserta Pelatihan	kegiatan	8	363.000.000	10	380.000.000	12	400.000.000	14	420.000.000	16	440.000.000	2.003.000.000		Tersediany a Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi	Terwujudn ya pelatihan berbasis kompetensi	kegiatan	8	363.000.000	10	380.000.000	12	400.000.000	14	##########	16	440.000.000							
														Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tersediany a Sumber daya berbasis kompetensi	kegiatan	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	120.000.000		Terciptany a Kondisi kerja yang kondusit melalui sosialisasi/ pelatihan	terwujudny a sosialisasi kegiatan	kegiatan	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000							

													Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	tersedianya tenaga kerja yang terampil yang mengelola usahanya melalui pelatihan kewirausahaan	kelompok	4	151.000.000	4	165.000.000	4	180.000.000	4	195.000.000	4	210.000.000	901.000.000		tersedianya tenaga kerja terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan menejemen pengelola usaha bagi wirausaha baru	terwujudnya pengelola usaha bagi wirausahan baru	kelompok	4	151.000.000	4	165.000.000	4	180.000.000	4	##########	4	210.000.000
													kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja dalam menemuhui pasar	kegiatan	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000	126.000.000		tersedianya tenaga kerja terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan menejemen pengelola usaha bagi wirausaha baru	terwujudunyan keterampilan bagi pencari kerja	kegiatan	1	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000

	kerja																													
														Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota														
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	kegiatan	1	16.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	97.000.000		Terlaksanannya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	terwujudnya pelayanan rehabilitas ketenagkerjaan	kegiatan	1	16.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000
														Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terlaksanaanya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja	kegiatan	1	20.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	26.000.000	1	29.000.000	120.000.000		terlaksanaanya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, jumlah informasi	terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja	kegiatan	3	120.000.000	3	142.000.000	3	153.000.000	3	161.000.000	3	174.000.000

	online														bursa tenaga kerja yang disebarluasan melalui job/bair pameran bursa kerja serta terwujudnya sosialisasi informasi bursa tenag ker																	
Job Fair/Bursa Kerja	jumlah informasi bursa tenaga kerja yang disebarluasan melalui job/bair pameran bursa kerja serta terwujudnya sosialisasi informasi bursa tenag kerja	kegiatan	2	100.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	145.000.000	630.000.000																		
														Pelindungan PMI (Pra , pmi dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota															

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah pelayanan CPMI/PMI dan terlaksannya pelatihan /bimtek/sosialisasi	kegiatan	1	16.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	97.000.000		berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	kegiatan	1	16.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000
														pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beropersai dalam satu daerah kab/kota																
pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	terwujudnya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan dan terwujudnya	kegiatan	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.500.000	57.500.000		Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	kegiatan	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.500.000

	sosialisasi pengupahan																												
														Pencegahan perselisihan Hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota														
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksanaya sosialisasi bipartit dan tripartit serta terselesainya hubungan indutrial	kegiatan	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.000.000	2	112.000.000	2	112.000.000	539.000.000		terwujudnya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksanaya sosialisasi bipartit dan tripartit serta terselesainya hubungan indutrial, sosialisasi pembentuk	Terlaksananya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksanaya sosialisasi bipartit dan tripartit pada bidang hubungan indutrial	kegiatan	3	112.000.000	3	118.000.000	3	124.000.000	3	127.000.000	3	127.500.000

Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi ke anggotaan pada organisasi pengusahaan serikat pekerja buruh serta nonafiliasi	terwujudnya sosialisasi pembentukan serikat pekerja di perusahaan dan terbentunya tim verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusahaan fedens dan konfedensi serikat pekrja	kegiatan	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.500.000	69.500.000		an serikat pekerja di perusahaan dan terbentunya tim verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusahaan fedens dan konfedensi serikat pekrja																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

No.	Indikator	Tahun					KONDISI AKHIR (2019)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	0.02 %	4,98 %	4,98 %	4,98 %	19.9 %	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	1 %	1 %	0.66 %	0.66 %	0.62 %	
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	0,01 %	0.73 %	0.29 %	838.2 %	0.94 %	
4	Besaran pencari kerja ang terdaftar ditempatkan	-	-	-	1%	1%	
5	Besaran pemeriksaan perusahaan	-	-	-	0.64 %	0.6 %	
6	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	-	-	-	0.028 %	0,26 %	
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	175	260	275	350	800	
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masarakat	100	150	150	150	524	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0,70	0,80	0,84	1	0,75	
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	518.167	514.726	476.626	439.561	662.001	

BAB VIII

PENUTUP

Penusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruhh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan Yang melibatkan lintas sektoral dan lintas satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Rencana Strategis Yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata menjadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting ang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan beapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan ungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat ang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kaupaten Bulukumba
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021 s.d. 2026

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasi Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudkan Visi, Misi dan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.